

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah yang luas dan memiliki keberagaman suku dan budaya. Sebagai negara dengan teritori yang luas, Indonesia memiliki jangkauan pemerataan kesejahteraan yang juga lebih luas. Untuk mendukung pemerataan ke setiap wilayah yang ada di Indonesia, maka dibuatlah sistem otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing daerah untuk dapat mengatur keperluan dan kebutuhan daerahnya. Dengan begitu, masing-masing daerah dapat mencapai pemerataan yang setara sesuai dengan asal usul, kebudayaan yang berkembang dan kebutuhan masyarakatnya.

Tujuan adanya otonomi daerah ini untuk mensejahterakan masyarakat serta membentuk wilayah yang mandiri. Hal ini mewujudkan salah satu tujuan negara yang tertuang dalam Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum. Tidak hanya melakukan pemerataan ekonomi di wilayah/kota besar, sistem otonomi daerah ini juga harus memastikan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok desa.

Sebagai bentuk pemerintahan terkecil dalam negara, desa diberi kewenangan tersendiri untuk melaksanakan sistem otonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Desa yang diprakarsai oleh aparatur desa memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan desa untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang merata. Pembangunan infrastruktur akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pemerintah desa sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menuntut pemerintah desa untuk selalu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintah desa yang bersih maka pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan desa. Adanya laporan keuangan

yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintah di masa yang akan mendatang (Pujanira dan Taman, 2017).

Laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Maka dari itu Sumber Daya Manusia dalam bidang keuangan atau Akuntansi sangat diperlukan bagi suatu entitas untuk dapat membuat laporan keuangan yang baik. Agar pengguna laporan keuangan dapat memahami laporan keuangan tersebut.

Akuntansi desa merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini banyak mendapat perhatian khusus terutama pada praktik-praktik akuntansi yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Hal ini tersebut terjadi karena adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas semua dana yang disalurkan pemerintah pusat kepada seluruh desa. Akuntabilitas yang dimaksud yaitu meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan.

Pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan desa diwujudkan dalam laporan keuangan pemerintahan desa. Terkait hal tersebut, pemerintahan mengacu pada permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang desa, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggungjawab, melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan desa.

Terbentuknya laporan keuangan desa yang berkualitas didukung dengan adanya perangkat desa yang berkualitas. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perangkat desa sebagai penggerak jalannya organisasi sangatlah diperlukan. Agar terdapat perangkat desa yang berkualitas perlu adanya manajemen sumber daya manusia. Pemerintah desa sangat membutuhkan perangkat desa yang profesional dengan memiliki wawasan yang luas, kompeten dalam bidangnya, dan memiliki jiwa kompetisi yang sportif (Oktarina, et al, 2016).

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan perangkat desa yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan baik

yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah (Kiranayanti dan Erawati, 2016).

Hal selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa adalah Sistem Pengendalian Internal. Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008, Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran, menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Adanya sistem pengendalian internal yang baik diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi sehingga proses akuntansi dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat serta dapat meyakinkan masyarakat desa tentang keakuratan, keandalan, dan ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah desa.

Dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat pengawasan pada seluruh anggota organisasi serta kegiatannya dan dapat mendeteksi terjadinya penyimpangan sejak dini serta dapat meminimalisir terjadinya tindakan yang akan merugikan organisasi tersebut. Untuk meyakinkan publik maupun stakeholder tentang keakuratan serta keandalan laporan keuangan desa yang dibuat oleh pemerintahan maka sistem pengendalian internal yang optimal dibutuhkan untuk menjaga aset organisasi. Pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk mengarahkan, mengukur sumber daya pada suatu organisasi, serta mengawasi yang memiliki peran paling penting dalam pencegahan serta pendeteksian penggelapan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan andal (Wardani & Andriyani, 2017).

Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh sistem informasi yang berkualitas pula. Sistem informasi sangat berperan sekali terhadap suatu entitas dalam mengelola laporan keuangan, menyediakan laporan keuangan, dan melaporkan keuangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan

keuangan adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan tersebut dihasilkan dari suatu proses berdasarkan input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik termasuk komitmen pimpinan daerah dan jajarannya (Kurniawan, 2011).

Fenomena yang di temui oleh peneliti adalah berasal dari fakta bahwa terdapat tuntutan untuk kepala desa dan aparatur desa di kabupaten bengkalis yang wajib memahami dan meningkatkan pemahaman terkait penggunaan aplikasi Siskudes atau sistem keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan pembangunan (BPKP) RI. Cara ini mampu mencegah aparat desa melanggar hukum dalam pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskudes sudah diterapkan sejak 2018, implementasi dari aplikasi ini berarti desa-desa dapat melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dan mampu membuat laporan-laporan terkait pengelolaan keuangan desa.

Fenomena masalah yang peneliti peroleh dilapangan yaitu terkait dengan seringnya terjadi keterlambatan penyelesaian laporan pertanggungjawaban dana desa dan alokasi dana desa. Hal ini diungkapkan oleh beberapa aparat desa yang ada dikecamatan bantan bahwa laporan keuangan sering mengalami keterlambatan dalam penyampaiannya kepada pihak kecamatan dan pemerintah kabupaten. Selain itu masalah yang lain adalah sebagian besar bendahara desa bukan berasal dari latar belakang akuntansi sehingga terkadang menyulitkan pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan karena kurangnya pemahaman perangkat desa dalam menggunakan aplikasi Siskeudes sehingga sering mengalami kesalahan dalam proses input dan menyebabkan kurangnya kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban yang dilaporkan. Menurut hasil survei, penggunaan teknologi informasi juga masih kurang memadai karena terdapat beberapa alasan pertama, meskipun setiap kantor desa sudah menggunakan perangkat komputer, namun perangkat tersebut masih kurang mampu memadai karena tidak adanya pemeliharaan dan perawatan yang teratur, kedua jaringan internet yang kurang lancar dan kurang mendukung pada beberapa daerah.

Banyak sekali perangkat desa yang menduduki jabatan dalam penyusunan laporan keuangan desa ini bukan berasal dari latar belakang pendidikan yang sesuai, berdasarkan hasil survey yang dilakukan bahwa perangkat desa yang menjabat sebagai penyusun laporan keuangan ini diangkat oleh kepala desa berdasarkan orang lama atau berkerja sudah lama dikantor desa tersebut. banyak contoh khusus yang terjadi sekarang bahwa perangkat desa yang menjabat itu adalah saudara ataupun kerabat dekat dari kepala desa itu sendiri tanpa melihat dari latar belakang pendidikan. Nah ini menjadi salah satu masalah dalam penyusunan laporan keuangan desa, karena untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan perangkat desa yang berkualitas.

Fenomena selanjutnya penemuan di beberapa desa di kecamatan bantan yang melakukan dugaan penyimpangan pada kegiatan desa yaitu, dugaan terjadinya realisasi keuangan tidak sesuai kegiatan fisik dilapangan, terjadinya mark-up pada kegiatan pengadaan perlengkapan kantor dan pengadaan lainnya terjadinya, dugaan markup pada kegiatan yang tidak mengacu kepada standar kegiatan fisik kabupaten, dan dugaan terjadinya penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan dari latar belakang masalah dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas diperlukan beberapa faktor penunjang. Diantaranya kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hal ini, penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap kualitas laporan keuangan yang dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Bantan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan didesa Kecamatan Bantan?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan didesa Kecamatan Bantan?
3. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan didesa Kecamatan Bantan?
4. Apakah kualitas Sumber Daya Manusia, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan didesa Kecamatan Bantan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan bisa mengfokuskan mengenai Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan. Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah prangkat desa yang berkaitan dalam pencatatan laporan keuangan dikecamatan bantan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan didesa Kecamatan Bantan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa Kecamatan Bantan
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan desa Kecamatan Bantan
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas SDM, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan desa Kecamatan Bantan.

1.5 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi
Hasil penelitian diharapkan menjadi tambahan informasi dan wawasan serta referensi mengenai kualitas SDM, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan.
2. Bagi praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

1.6 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan proposal pengaruh kualitas SDM dan terhadap kualitas laporan keuangan di desa kecamatan Bengkalis adalah:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam BAB 1 penulis menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah dan batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan suatu penelitian didalam laporan proposal.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB 2 ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang relevan sesuai dengan pokok bahasan penelitian proposal.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam BAB 3 ini penulis menguraikan tentang lokasi bab waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Dalam BAB 4 penulis menguraikan tentang tinjauan umum lokasi/subjek penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB 5 : PENUTUP

Dalam BAB 5 ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN